

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, telah memberi wewenang yang besar kepada daerah propinsi, kota dan kabupaten untuk mengatur rumah tangganya masing-masing. Pemerintah Kabupaten Tegal mempunyai kewenangan dalam merencanakan, merancang dan membangun sarana dan prasarana khususnya dalam bidang ketekniksipilan. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut pada umumnya masih dilaksanakan oleh pihak kedua dengan sistem kontrak. Pembangunan fisik yang dimaksud antara lain adalah pembangunan jalan dan jembatan, saluran drainase, atau bangunan-bangunan air lainnya yang ditangani secara sektoral oleh Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal .

Disaat kontrak ditandatangani pada saat itu pula semua peraturan harus sudah disetujui kedua belah pihak yaitu antara pemberi kerja (Pemerintah Kabupaten) dengan rekanan (Kontraktor). Peraturan tersebut antara lain berupa penetapan harga satuan sesuai dengan standar harga yang berlaku di kabupaten Tegal. Pada kenyataannya, pelaksanaan pembangunan tersebut di atas mengalami perbedaan dalam penentuan harga satuan sehingga akan terjadi perbedaan harga pelaksanaan konstruksi antara ke-bina margaan dengan ke-cipta karyaan dan pengairan. Hal ini

dapat terjadi karena standar dan analisis harga satuan didasarkan pada pedoman yang berbeda, yang mana pengairan menggunakan standar analisa *BOW* (*Burgelijke Openbare Werken*), sedangkan pekerjaan ke-bina margaan berdasarkan analisa BPJK (Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten).

Adanya perbedaan tersebut telah menimbulkan akibat yang membuat Pemerintah Kabupaten Tegal perlu mencari solusi yang pada awalnya hanya disepakati dengan Surat Persetujuan Bupati mengenai perbedaan tersebut. Namun demikian cara ini dirasa masih kurang sehingga diperlukan kajian khusus yang berkaitan dengan rencana penyeragaman analisa harga satuan yang akan dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.

Analisa *BOW* memuat koefisien-koefisien tenaga kerja dan material, sehingga jika keduanya berturut-turut dikalikan dengan harga upah tenaga kerja dan harga material akan diperoleh harga satuan upah tenaga kerja dan harga satuan material. Harga satuan pekerjaan merupakan penjumlahan dari keduanya. Analisis BPJK merupakan analisa harga satuan untuk pekerjaan-pekerjaan jalan dan atau jembatan yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Marga. Analisa BPJK merupakan pengembangan dari analisa *BOW* khusus untuk pekerjaan-pekerjaan kebinamargaan (jalan/jembatan).

Analisa BPJK disamping memuat koefisien bahan dan tenaga kerja juga memuat koefisien peralatan dan jenis peralatan yang digunakan dalam melaksanakan suatu item pekerjaan. Analisa BPJK telah menerapkan perkembangan teknologi maupun alat yang dipakai sehingga koefisien-koefisien yang disajikan dalam bentuk angka yang bulat sehingga menjadi lebih mudah dalam pelaksanaannya.

Dengan melihat kondisi tersebut di atas maka perlu dilakukan suatu kajian untuk mendapatkan cara perhitungan atau analisis biaya konstruksi yang sesuai dengan kondisi di Kabupaten Tegal dan tentu saja dapat digunakan baik untuk pekerjaan-pekerjaan jalan/jembatan dan bangunan gedung maupun bangunan pengairan. Cara perhitungan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi pelaksana di lapangan dan akan lebih baik lagi jika sudah dalam bentuk Perda.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat diambil suatu rumusan masalah pokok sebagai berikut :

1. Dari metode *BOW* dan *BPK*, mana yang lebih baik ditinjau dari segi waktu, jumlah material (bahan) dan biaya.
2. Bagaimana perbandingan harga satuan pekerjaan dari kedua metode tersebut.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam kajian ini adalah mendapatkan analisa harga satuan pekerjaan dari kedua metode tersebut, kemudian membandingkannya mana yang lebih baik untuk diterapkan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dapat membandingkan persamaan dan perbedaan antara hasil pekerjaan menggunakan analisa harga satuan metode *BOW* dan BPJK.
2. Dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing analisa sehingga dapat disimpulkan mana yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan untuk diterapkan baik dari segi bahan, tenaga kerja dan biaya.

1.5 Batasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan maka diberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut :

1. Kajian dilakukan di Kabupaten Tegal.
 - a. Pekerjaan pasangan batu belah pada tepi Saluran Irigasi di Desa Mulyoharjo.
 - b. Pekerjaan bronjong di Saluran Sekunder Waduk Cacaban dan Desa Sidapurna.
 - c. Pekerjaan plesteran pada tepi Saluran Irigasi di Desa Mulyoharjo.
2. Kajian dilakukan terhadap hasil penelitian pekerjaan pasangan batu belah pada volume 3 m^3 dilakukan pada tepi saluran irigasi, pekerjaan bronjong pada volume 3 m^3 dilakukan pada tepi sungai dan pekerjaan plesteran pada luas 3 m^2 dilakukan pada saluran irigasi.
3. Faktor-faktor seperti jarak material, cuaca, waktu persiapan, kualitas mutu dan faktor non teknis lainnya tidak dikaji.